



Pemda Membuat Dermaga Darurat

TPST Piyungan Beroperasi Lagi Hari Ini



Yang pasti, besok (hari ini) sudah mulai dibuka lagi (TPST Piyungan).

Gatot Saptadi
Sekda DIY

YOGYA, TRIBUN - Sekda DIY, Gatot Saptadi, menegaskan jika operasional Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan mulai dilakukan Jumat (29/3) hari ini. Namun, pembuangan sampah ini akan diatur sesuai dengan wilayah agar tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang. "Mulai sore ini (kemarin) mungkin dicicil, bisa atau *ndak* itu urusan lapangan. Yang pasti, besok (hari ini) sudah mulai dibuka lagi (TPST Piyungan)," ujar Gatot saat ditemui *Tribun Jogja* di ruang ker-

● ke halaman 15

Mencari Solusi Sampah

- Mulai hari ini Pemda DIY memastikan bahwa TPST Piyungan akan beroperasi lagi.
- Satu solusinya konkretnya adalah membangun dermaga darurat.
- Dermaga darurat sepanjang 12 meter ini dibuat dengan box culvert yang diruk dan dimungkinkan dua truk bisa masuk.
- Mekanisme pembuangan sampah nantinya akan diatur oleh wilayah.
- Pembuangan sampah pada hari pertama setelah TPST Piyungan dibuka lagi dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan Bantul.
- Untuk sampah dari Kota Yogyakarta dimungkinkan akan dibuang setelahnya, mengingat volumenya terbesar.
- Sejumlah TPS di Kota Yogyakarta masih terlihat ada sampah menumpuk bahkan sampai berlaburan ke jalanan.

Pemda Membuat

• Sambungan Hal 9

janya, Kamis (28/3) sore.

Gatot menjelaskan, pembuangan sampah ini akan menggunakan dermaga darurat yang dibuat oleh Pemda DIY. Dermaga darurat berukuran panjang 12 meter ini dibuat dengan *box culvert* yang diuruk dan dimungkinkan dua truk bisa masuk. "Kami memastikan dermaga darurat ini sudah bisa digunakan. Dua truk bisa masuk sehingga tidak ada antrean panjang untuk pembuangan sampah," urainya.

Gatot menjelaskan, jika menunggu pengolahan dengan alat berat maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga, persoalan sampah di TPST Piyungan tidak bisa langsung ditangani dengan cepat.

Adapun mekanisme pembuangan sampah, nantinya akan diatur oleh wilayah. Misalnya, ujar Gatot, pembuangan pada hari pertama dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Sementara untuk sampah dari Kota Yogyakarta dimungkinkan akan dibuang setelahnya. "Hal ini karena sampah dari kota (Yogyakarta) yang paling besar volume-

nya. Tetapi, mekanisme ini diatur orang teknis di lapangan. *Monggo* (silakan) saja agar tidak langsung menumpuk," urainya.

Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana mengapresiasi langkah Pemda DIY untuk membangun dermaga darurat. Hal ini menjadi solusi jangka pendek untuk persoalan sampah yang menumpuk di TPST Piyungan. "Ini merupakan langkah yang bagus. Hal ini sesuai dengan yang disepakati saat bertemu dengan masyarakat, pengelola TPST dan ini langkah darurat untuk sampah ini," ujarnya kepada *Tribun Jogja*, Kamis (28/3) sore.

Menumpuk

Imbas dari tidak beroperasinya TPST Piyungan, hingga kemarin masih dirasakan warga. Penumpukan masih terjadi di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Seperti di TPS barat Stadion Mandala Krida. Bau menyengat tumpukan sampah sekitar tiga meter itu akan jauh lebih menyengat ketika angin bertiup cukup kencang. Lalat-lalat yang berkeliaran tidak lagi bisa dihitung dengan jari, terkadang hinggap di kepala dan telinga. Selain itu, sampah

di sejumlah TPS Kecamatan Klitren terpantau mulai menumpuk dan meluber ke jalanan. Bahkan di TPS Pengok dipasang spanduk imbauan bertuliskan 'Dilarang Buang Sampah di Sini'.

"(Sampah) sudah numpuk dari hari Minggu, warga kita sudah imbau untuk setop buang (sampah) dulu, khusus yang pakai gerobak, karena kalau tidak disetop nantinya numpuk terus. Tapi kalau satu atau dua kresek (kantong plastik) tidak apa-apa, kan tidak enak toh kalau hanya segitu," kata petugas TPS Mandala Krida, Bibit saat ditemui *Tribun Jogja*, kemarin.

Ia mengungkapkan, sudah ada warga yang protes karena tidak bisa membuang sampah di sana. Namun, tidak banyak yang bisa dilakukan petugas selain menunggu keputusan untuk dapat mengangkut sampah lagi mulai Jumat atau Sabtu besok.

Keluhan juga dilakukan oleh para pedagang di sekitaran Stadion Mandala Krida. Mujirahayu seorang pedagang soto mengungkapkan, dia sangat terganggu dengan tumpukan sampah yang tepat berada di seberang warungnya itu. Baunya yang menyengat dapat menurunkan omzet

dagangannya.

"Kita ini yang jual makanan, otomatis sangat terganggu dengan pemandangan dan baunya. Memang dari beberapa hari ini penjualan saya jadi berkurang walau tidak seberapa. Tapi, ya, mau bagaimana lagi," kata Mujirahayu yang telah berjualan di sana selama 10 tahun.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup DIY, Halik Sandera menyebut, penutupan TPST Piyungan merupakan dampak panjang yang sudah dirasakan warga sekitar. Hal ini karena sistem *sanitary landfill* berubah ke *open dumping*, sehingga radius baunya semakin meluas.

Dia menjelaskan, dampak lainnya akibat *open dumping* adalah semakin banyak titik tumpukan sampah yang tidak terangkut atau bahkan potensi munculnya tempat pembuangan ilegal. Selain itu, sungai juga menjadi tempat pembuangan sampah.

"Hal yang mendesak untuk pengangkutan sampah di TPST Piyungan adalah angkutan yang standar. Di antaranya truk yang tertutup dan bukan hanya ditutup terpal. Serta, sampah serta air lindi tidak bececeran," urainya. (ais/mgl)

Ada Peringatan Sejak 2014

KETUA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Budhi Masturi menjelaskan, sebenarnya dari 2014 sudah ada peringatan mengenai kapasitas TPST Piyungan yang hampir kelebihan kapasitas. Sehingga solusinya bisa ekstensifikasi dengan perluasan lahan maupun intensifikasi.

"Kami ke lapangan, di Piyungan itu jalannya berlumpur, becek, dan memang tumbukan sampah seperti itu, alat berat juga minim. Ada bantuan alat berat dari provinsi itu pun gampang rusak," ujarnya sesuai bertemu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, kemarin.

Budhi menjelaskan, masalah sampah ini benar-benar memprihatikan. Ketika tidak ditangani serius akan menjadi bom waktu. "Oleh karena itu, sudah

● ke halaman 15

Ada Peringatan

● Sambungan Hal 9

saatnya pemerintah provinsi memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini," ucapnya.

Sementara itu, Fajar Wahyu Kurniawan, Komisioner Lembaga Ombudsman DIY menerangkan, ada dua mekanisme yang harus dilakukan untuk penanganan sampah. Pertama, di level produsen, yakni semua yang menghasilkan sampah harus mulai mengurangi penggunaan sampah. Kedua, ketika sampah ini sudah jadi, maka harus ditangani. Di mana masyarakat yang ingin membuang harus sudah menanganinya dengan cara memilah-

nya sebelum dibawa ke TPS.

"Bagaimana sampah menjadi perhatian semua lapisan masyarakat, termasuk kita selaku produsen sampah. TPST Piyungan sudah dibangun 1992, artinya sudah cukup waktu untuk evaluasi. Beberapa informasi, diprediksi *overload* 2020. Itu bukan lagi darurat, tapi penting dan genting, untuk segera ditangani," ungkapnya.

Ketua Lembaga Ombudsman DIY, Suryawan Raharjo, mengatakan saat ini permasalahan sampah di DIY ada di titik puncaknya. Pihaknya akan konsen dan berkomitmen untuk mengawal persoalan ini.

Pengelolaan

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi me-

ngatakan, pihaknya telah merancang pengelolaan sampah jangka panjang. Harapannya nanti Kota Yogyakarta sudah bisa secara mandiri mengelola sampah tanpa mengandalkan TPST Piyungan yang ditutup. "Kita jadikan Tegalrejo *pilot project* untuk pengelolaan sampah. Nantinya dengan teknologi, sampah organik maupun nonorganik akan dijadikan bata dan batako," jelasnya, Kamis (28/3).

Dia menjelaskan, tidak perlu memilah sampah organik dan nonorganik untuk bisa diubah menjadi bata menggunakan teknologi tersebut. Kedua jenis sampah bisa diolah bersamaan dan memakan waktu paling lama

6 jam untuk 4-8 ton sampah hingga dapat menghasilkan produk berupa bata dan batako. "Bentuknya seperti menara, ada cerobongnya. Harganya Rp170 juta-200 juta per unit," ucapnya.

Ia menjelaskan, bahwa awalnya dirinya mengalokasikan 3 unit di 3 lokasi yang ada di Tegalrejo. Namun karena ada dana kelurahan yang membutuhkan konsolidasi lagi serta keterbatasan lahan, maka saat ini hanya ada 2 lokasi yang dipilih. "Sampah diselesaikan di situ dan tidak membuat bau. Nanti kalau Tegalrejo selesai, maka akan diterapkan di seluruh kota dan tak ada lagi tumpukan sampah di Piyungan dari kota," tegasnya. (may/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005